



PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI

RENCANA KERJA

RENJA

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL**

KABUPATEN WONOGIRI

TAHUN 2026

Daftar Isi

	Halaman
KATA PENGANTAR	
DAFTAR ISI	
BAB PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Landasan Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II Evaluasi Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun berkenan	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2025 Triwulan II Perangkat Daerah dan Capaian Renstra (OPD) Periode 2021-2026.	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	23
2.3. Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah	31
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	40
BAB III Rencana Kerja Dan Pendanaan Perangkat Daerah	45
3.1. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah	45
BAB IV PENUTUP	75
4.1 Catatan penting	75
4.2 Kaidah Pelaksanaan	
4.3 Rencana Tindak Lanjut	75
4.4 Manajemen Resiko pada Program di Disdukcapil	76
4.5 Manajemen Risiko pada Kegiatan di Disdukcapil	78

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI WONOGIRI
NOMOR : 25
TENTANG :
PENETAPAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

RENCANA KERJA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri No. 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri, dalam upaya Penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat perlu disusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai dokumen perencanaan tahunan untuk Tahun Anggaran 2026, yang memuat usulan rencana kerja program/kegiatan / Sub Kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing Perangkat Daerah.

Rencana Kerja (Renja) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah satu tahunan sebagai tindak lanjut dari Rencana Strategis (Renstra) digunakan sebagai dasar penyusunan RKPD oleh Bappeda dan Litbang dalam pelaksanaan pembangunan satu tahunan daerah yang

merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Kerja (Renja) memuat program dan kegiatan/ Sub Kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran berupa pagu indikatif digunakan sebagai dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan digunakan dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri:

1. Undang – Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-undang RI Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
 13. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Tahun 2013 Nomor 257);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 03 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Wonogiri;
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 156);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 194);
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 - 2026;
19. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025);
20. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 41 Tahun 2006 tentang Pembebasan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Akta Kelahiran Umum / Lahir ;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra (Rencana Strategis) yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan, sehingga Rencana Kerja merupakan dokumen tertulis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sebagai peraturan formal dan mengikat setiap kegiatan dinas artinya semua kegiatan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan kegiatan dinas senantiasa harus mengacu dan berpedoman pada kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kerja.

Dengan telah disusunnya Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun 2026 ini diharapkan tersedianya Dokumen Rencana Kerja Tahunan sebagai Usulan Rencana Program dan Kegiatan yang

mengacu dari Rencana Strategis pada masing-masing Perangkat Daerah.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 adalah:

1. Sebagai arah dan landasan berpijak bagi setiap pelaksanaan kegiatan, mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai pengawasan.
2. Sebagai pedoman dan acuan bagi pengukuran kemajuan pelaksanaan tugas-tugas pelaksanaan kegiatan.
3. Sebagai petunjuk operasional pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap personil dinas dalam upaya pencapaian tugas kedinasan

1.4. Sistematika Penyusunan

Mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, termasuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta tata cara evaluasi dan perubahannya Sistematika Penyusunan Renja Tahun 2026 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenan

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II tahun 2025 Perangkat Daerah dan Capaian Renstra (OPD) Periode 2021-2026.
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
PD

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat

BAB.III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah

BAB.IV PENUTUP

BAB II

Evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II tahun berkenan

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun 2025 Triwulan II Perangkat Daerah dan Capaian Renstra (OPD) Periode 2021-2026.

Pengertian Evaluasi Kinerja adalah analisis hasil capaian kinerja untuk mencari hubungan sebab akibat antara pelaksanaan kegiatan/program dan hasilnya, disamping mengidentifikasi dan memilih permasalahan serta menjelaskan hasil pengukuran kinerja (kegagalan dan keberhasilan). Tujuan dari evaluasi kinerja adalah untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuannya, kendala yang dijumpai, sehingga dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan dan pelaksanaan program kegiatan di masa yang akan datang.

Penyusunan Renja harus berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah bertujuan menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.

Selain berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Renja Perangkat Daerah juga harus berpedoman pada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, guna memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan atau kegiatan baru yang disusun dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pelaksanaan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri pada tahun 2025, dimaksudkan untuk:

1. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Mengetahui realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

Sehingga dengan adanya pelaksanaan evaluasi tersebut dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Pada Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program kegiatan Sub Kegiatan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 7.287.390.366,- sedangkan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan II mencapai Rp. 3.685.748.322,- sisa anggaran yang belum terealisasi adalah Rp. 3.501.642.044,- telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri adalah 50.58 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Wonogiri.

Pada tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri terdapat 4 program yaitu:

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah persentase tertib pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dengan target kinerjanya 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur kelancaran tugas pelaporan kinerja administrasi Pemerintahan Daerah dalam satu tahun. Di tahun 2025 sampai dengan Triwulan II, program ini terealisasi 100% sesuai dengan yang ditargetkan di Renstra periode 2021-2026.

Alokasi anggaran untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di tahun 2025 sebesar Rp. 6.997.500,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.227.500,- (31.83 %) sampai dengan Triwulan II 2 tahun 2025.

Pelaksanaan Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diimplementasikan melalui 6 kegiatan, sebagai berikut:

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Didukung dengan 3 sub kegiatan yaitu:

- 1) Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan;
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dengan outputnya adalah 2 laporan yang belum terealisasi sesuai targetnya yaitu 0 %. Didukung anggaran Rp. 1.000.000,- telah terserap sebesar Rp. 0,- (0 %) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LKJIP) proses penyusunan laporan pada akhir Tahun Anggaran.
- 2) Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
Difokuskan Jumlah dokumen LPPD/ LKPJ yang tersusun dengan outputnya adalah 10 laporan belum terealisasi sesuai targetnya yaitu 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.000.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 0,- (0 %)

dokumen LPPD/ LKPJ proses penyusunan laporan pada akhir Tahun Anggaran.

- 3) Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

Difokuskan Jumlah dokumen RKPD, RKA, DPPA, DPA yang tersusun dengan outputnya adalah 7 Dokumen yang telah terealisasi sesuai targetnya yaitu 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 4.997.500,- dan telah terserap sebesar Rp. 2.227.500,- (44.57 %)

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN Daerah;

Difokuskan terpenuhinya penyediaan gaji dan tunjangan ASN Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN dengan outputnya adalah 280 orang/bulan telah terealisasi sesuai targetnya yaitu 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 3.498.183.811,- dan telah terserap sebesar Rp. 1.522.470.348,- (43.52 %)

- 2) Sub Kegiatan Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD;

Difokuskan terpenuhinya Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD output dari kegiatan ini adalah 20 dokumen Realisasi atas kegiatan ini adalah 100%. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 1.888.887,- dan telah terserap sebesar Rp. 1.258.500,- (66.63 %)

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 2 sub kegiatan yaitu

- 1) Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai;

Berdasarkan Tugas dan Fungsi Jumlah Pegawai
Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan output dari kegiatan ini
adalah 5 orang atas kegiatan ini adalah 100%.
Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana
sebesar Rp. 5.000.000,- dan telah terserap sebesar
Rp. 0,- (0%)

Belum terserap sampai dengan Triwulan II karena
belum tersedianya Program Pelatihan yang Sesuai
Anggaran pendidikan dan pelatihan biasanya
digunakan untuk peningkatan kapasitas
berdasarkan tugas dan fungsi. Jika belum ada
pelatihan yang relevan dengan kebutuhan
Disdukcapil (misalnya tentang administrasi
kependudukan, digitalisasi pelayanan, atau
pemanfaatan SIAK), maka dana belum diserap

2) Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan.

Difokuskan untuk pendidikan dan pelatihan pegawai
berdasarkan tugas dan fungsinya melalui berbagai
bimtek dan diklat dan juga untuk sosialisasi
peraturan perundang-undangan yang ada. Output
dari kegiatan ini adalah 150 orang yang dapat
mengikuti sosialisasi. Realisasi atas kegiatan ini
100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan
dana sebesar Rp. 142.391.790 dan telah terealisasi
sebesar Rp. 139.051.250,- (97.65 %).

d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 6 sub kegiatan sebagai
berikut:

- 1) Sub Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor:
Difokuskan untuk Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang. Output dari kegiatan ini adalah 14 paket Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 5.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.095.000,- (41.9 %).
- 2) Sub kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor;
Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang. Output dari kegiatan ini adalah 10 paket Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 254.104.978,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 195.932.950 (77.11 %).
- 3) Sub kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor;
Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan Output dari kegiatan ini adalah 24 paket kegiatan Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 9.999.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 3.908.000.00,- (39.08 %).
- 4) Sub kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu;
Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Output dari kegiatan ini adalah 12 laporan Realisasi atas sub kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar 20.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 5.240.250,- (26.2 %).
- 5) Sub kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD; dan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Output dari kegiatan ini adalah 12 laporan Realisasi atas sub kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp.

36.500.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 36.393.500,- (99.71 %).

- 6) Sub kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan:

Difokuskan Jumlah jenis kebutuhan barang cetak dan penggandaan selama satu tahun Output dari kegiatan ini adalah 6 paket Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 41.525.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.275.400. (3.0 %).

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 3 sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Output adalah 100 laporan Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 1.000.000,- (50 %).

- 2) Sub kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

kegiatan ini adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan Output dari kegiatan ini adalah 4 laporan atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 312.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp 138.796.386,- (44.49 %).

- 3) Sub Kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor;

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan sejumlah 25 laporan Realisasi atas kegiatan ini adalah 100%. Kelancaran kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp.

939.372.000,- dan telah terserap sebesar Rp. 371.230.756 (39.52 %).

f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini didukung oleh 4 sub kegiatan sebagai berikut:

- 1) Sub kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional;

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan yang disediakan . Output dari kegiatan ini adalah 23 unit Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 26.949.175 (44.92 %).

- 2) Sub kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya;

Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara Output dari kegiatan ini adalah 15 unit Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 15.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp. 2.015.000 (13.43 %).

- 3) Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya:

Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Dipelihara Output dari kegiatan ini adalah 1500 M² Realisasi atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 30.000.000,- dan telah terealisasi sebesar Rp.0,- (0 %).hal ini disebabkan pada semester awal, pelaksanaan kegiatan difokuskan pada kegiatan yang bersifat mendesak atau wajib terlebih dahulu, sehingga kegiatan pemeliharaan fisik dijadwalkan pada triwulan selanjutnya

- 4) Sub kegiatan Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya;

Kegiatan ini difokuskan untuk pemeliharaan terhadap barang milik daerah seperti kendaraan dinas (operasional dan lapangan, perorangan dan jabatan), gedung dan sarana prasarana. Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi Realisasi 112 Unit atas kegiatan ini 100%. Demi mendukung kelancaran kegiatan ini, dianggarkan dana sebesar Rp. 20.000.000 dan telah terserap sebesar Rp. 1.830.000 (9.15 %).

2. Program Pendaftaran Penduduk

Indikator kinerja program pendaftaran penduduk ini adalah persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk dengan target kinerja 97%. Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (ktp-el, KK, KIA, pindah datang) dalam 1 tahun.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program pendaftaran penduduk di tahun 2025 sebesar Rp. 769.414.070 terealisasi sebesar Rp. 709.474.255 (92.21%).

Untuk mendukung program pendataan penduduk, dilaksanakan melalui Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk di tahun 2025 sebesar Rp. 769.414.070 dan terealisasi sebesar Rp. 709.474.255 (92.21%).

Dalam mendukung kegiatan pelayanan pendaftaran penduduk, diimplementasikan dalam 3 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk:

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk Realisasi 255.785 dokumen dari target 207500 dokumen atas kegiatan ini adalah 100%. Kelancaran kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 677.727.500,- dan telah terserap sebesar Rp. 622.349.255 (91.83%).

- b. Sub kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk;

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Realisasi 12 laporan dari target 12 laporan atas kegiatan ini adalah 100%. Kelancaran kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 89.391.570 dan telah terserap sebesar Rp. 84.843.500 (94.91%).

- c. Sub kegiatan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan;

Output dari kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan Realisasi 13.455 dari target 9.000 dokumen atas kegiatan ini adalah 149 %. Kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 2.295.000 dan telah terserap sebesar Rp. 2.281.500 (99.41%).

3. Program Pencatatan Sipil

Indikator kinerja program pencatatan sipil ini adalah persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil dengan target kinerja 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan) dalam 1 tahun.

Alokasi anggaran untuk pelaksanaan program pencatatan sipil di tahun 2025 sebesar Rp. 385.566.510. dan terealisasi sebesar Rp. 165.680.860 (42.97 %).

Kemudian, untuk mendukung program pencatatan sipil, diimplementasikan melalui Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan pencatatan sipil di tahun 2025 sebesar Rp. 385.566.510. dan terealisasi sebesar Rp. 165.680.860 (42.97%).

Dalam mendukung kegiatan pelayanan pencatatan sipil, diimplementasikan dalam 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan Pencatatan Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting:

Out put dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting Realisasi 30986 dokumen dari target 35000 dokumen realisasi kegiatan ini adalah 100 %. kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 88.924.010 dan telah terserap sebesar Rp. 1.369.000 (1.54 %).

- b. Sub kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil;

Kedua sub kegiatan tersebut difokuskan untuk menghitung cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil terutama berupa akte kelahiran, akte kematian dan akte perkawinan. Out put dari sub kegiatan ini adalah terpenuhinya Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan Realisasi 11 layanan dari target 11 layanan realisasi kegiatan ini adalah 167.93 %. kegiatan ini didukung dengan anggaran dana sebesar Rp. 296.642.500 dan telah terserap sebesar Rp. 164.311.860. (55.39 %).

4. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Indikator kinerja program pengelolaan informasi administrasi kependudukan ini adalah persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data dengan target kinerja 100%. Indikator ini digunakan untuk mengukur cakupan pemanfaatan data serta memastikan kelancaran dalam akses data dalam 1 tahun.

Kemudian, untuk mendukung program pengelolaan informasi administrasi kependudukan, diimplementasikan melalui Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan. Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tahun 2025 sebesar Rp. 732.446.820 dan terealisasi sebesar Rp. 358.919.192 (49 %).

Dalam mendukung kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, diimplementasikan dalam 2 sub kegiatan, sebagai berikut:

- a. Sub kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan output 4 laporan terealisasi 4 laporan Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tahun 2024 sebesar Rp. 345.754.820 dan terealisasi sebesar Rp. 282.009.492,- (81.56 %).
- b. Sub kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan. Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan;
Output 22 dokumen terealisasi 22 dokumen Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tahun 2024 sebesar Rp. 386.692.000 dan terealisasi sebesar Rp. 76.909.700 (19.89 %).

Output 22 dokumen terealisasi 22 dokumen Alokasi anggaran untuk pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tahun 2024 sebesar Rp. 386.692.000 dan terealisasi sebesar Rp. 76.909.700 (19.89 %).

Tabel 2.1.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Tahun 2024 s/d 2025

Kode 1	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2024	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan 2025	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 %	12 Buku	12 Buku	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100 %	280 org/bulan	280 org/bulan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase peningkatan SDM perangkat daerah yang sesuai tugas dan fungsi	100 %	2 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kinerja administrasi umum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)

2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 %	112 Unit	112 Unit	112 Unit	100 %	100 %	100 %
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	92,21 %	90 %	106,598 %	109,89 %	92,21 %	198,808 %	215,60 %
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah orang yang tertib adminduk	218.500 Orang	207.500 Orang	160.473 Orang	77,336 %	77,336 %	378.973 Orang	173,44 %
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	100 %	-	100 %	100 %	100 %	200 %	200 %
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil	20.000 Lembar	20.000 Lembar	38.253 Lembar	191,265 %	191,265 %	59,253 Lembar	296,265 %
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.12.04.2.03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan	25 Kecamatan	25 Kecamatan	25 Kecamatan	100 %	100 %	25 Kecamatan	100 %

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Program/kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2025 merupakan bagian integral dari upaya Pemerintah Kabupaten Wonogiri untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Untuk kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dievaluasi dengan parameter indikator yang tercantum dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri. Dengan mengevaluasi capaian indikator tersebut diharapkan dapat memberi gambaran tentang tingkat keberhasilan dan potensi pengembangan kedepannya.

Indikator kinerja adalah merupakan pengukuran kinerja yang akan dicapai oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam kurun waktu 5 (lima) tahun periode Rencana Strategis Tahun 2021-2026. Pengukuran kinerja merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan dan/atau kegagalan dari pelaksanaan pelayanan kedinasan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri, yang secara operasional dilaksanakan setiap tahun melalui program dan kegiatan dan Sub Kegiatan.

Berikut kami sampaikan capaian kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan pada periode triwulan II tahun 2025:

1. Capaian kinerja indikator Tujuan "Nilai kematangan organisasi DISDUKCAPIL" pada adalah sebesar 0 % dari target yang direncanakan sebesar 46 persentase capaian kinerjanya adalah 0 %, belum tercapai dikarenakan proses penilaian kematangan organisasi belum dapat dilaksanakan pada tahun berjalan serta belum adanya asistensi atau fasilitasi dari instansi pembina terkait
2. Capaian kinerja indikator Tujuan "Indeks pelayanan Publik bidang kependudukan dan Pencatatan Sipil" adalah sebesar 4.68 % dari target yang direncanakan sebesar 4.463

persentase capaian kinerjanya adalah 104.86 % menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas layanan, penerapan standar pelayanan yang lebih optimal, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, serta peningkatan kompetensi dan responsivitas petugas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat

3. Capaian kinerja indikator "Jumlah ASN DISDUKCAPIL yang menjadi agen perubahan" adalah sebesar 4 dari target yang direncanakan sebesar 4 persentase capaian kinerjanya adalah 100 % bahwa seluruh target yang direncanakan telah tercapai sepenuhnya. Pencapaian ini didukung oleh proses seleksi dan penetapan agen perubahan yang dilakukan secara transparan dan partisipatif, serta adanya komitmen pimpinan dalam mendorong ASN untuk berperan aktif dalam membawa perubahan positif di lingkungan kerja. Selain itu, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan agen perubahan juga telah berjalan dengan baik untuk mendukung terciptanya budaya kerja yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik
4. Capaian kinerja indikator "Indeks Inovasi DISDUKCAPIL" pada adalah sebesar 1 dari target yang direncanakan sebesar 1 persentase capaian kinerjanya adalah 100 % bahwa target inovasi organisasi telah sepenuhnya tercapai. Pencapaian ini didukung oleh pengembangan dan penerapan inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keterlibatan aktif pegawai dalam proses inovasi, serta dukungan manajerial dan kebijakan internal untuk mendorong budaya inovatif di lingkungan kerja. Inovasi yang dihasilkan telah berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan

persentase capaian kinerjanya adalah 104.86 % menunjukkan bahwa kualitas pelayanan publik yang diberikan telah melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas layanan, penerapan standar pelayanan yang lebih optimal, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan administrasi kependudukan, serta peningkatan kompetensi dan responsivitas petugas pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat

3. Capaian kinerja indikator "Jumlah ASN DISDUKCAPIL yang menjadi agen perubahan" adalah sebesar 4 dari target yang direncanakan sebesar 4 persentase capaian kinerjanya adalah 100 % bahwa seluruh target yang direncanakan telah tercapai sepenuhnya. Pencapaian ini didukung oleh proses seleksi dan penetapan agen perubahan yang dilakukan secara transparan dan partisipatif, serta adanya komitmen pimpinan dalam mendorong ASN untuk berperan aktif dalam membawa perubahan positif di lingkungan kerja. Selain itu, kegiatan pembinaan dan pemberdayaan agen perubahan juga telah berjalan dengan baik untuk mendukung terciptanya budaya kerja yang inovatif, adaptif, dan berorientasi pelayanan publik
4. Capaian kinerja indikator "Indeks Inovasi DISDUKCAPIL" pada adalah sebesar 1 dari target yang direncanakan sebesar 1 persentase capaian kinerjanya adalah 100 % bahwa target inovasi organisasi telah sepenuhnya tercapai. Pencapaian ini didukung oleh pengembangan dan penerapan inovasi pelayanan publik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, keterlibatan aktif pegawai dalam proses inovasi, serta dukungan manajerial dan kebijakan internal untuk mendorong budaya inovatif di lingkungan kerja. Inovasi yang dihasilkan telah berkontribusi terhadap peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan administrasi kependudukan

5. Capaian kinerja indikator Sasaran "Nilai SAKIP DISDUKCAPIL" adalah sebesar 83.10 % dari target yang direncanakan sebesar 78.5 persentase capaian kinerjanya adalah 105.86 adanya peningkatan kinerja akuntabilitas instansi. Capaian ini didukung oleh penguatan perencanaan kinerja yang lebih terukur, pelaksanaan program dan kegiatan yang selaras dengan sasaran strategis, serta peningkatan kualitas pelaporan kinerja yang berbasis hasil (outcome). Selain itu, terdapat perbaikan dalam monitoring dan evaluasi internal serta tindak lanjut atas rekomendasi evaluasi SAKIP tahun sebelumnya."
6. Capaian kinerja indikator Sasaran "IKM DISDUKCAPIL" adalah sebesar 95.55 % dari target yang direncanakan sebesar 86 % persentase capaian kinerjanya adalah 111.1 % bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan sangat baik dan melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh peningkatan kualitas layanan, penyederhanaan prosedur, penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan, serta responsivitas petugas dalam menangani kebutuhan dan keluhan masyarakat. Selain itu, evaluasi dan perbaikan layanan secara berkelanjutan turut berkontribusi terhadap peningkatan IKM ini."
7. Capaian kinerja indikator Sasaran "Nilai Indeks Profesional ASN" adalah sebesar 81.459 % dari target yang direncanakan sebesar 85.50 % persentase capaian kinerjanya adalah 95.27 % bahwa tingkat profesionalisme ASN DISDUKCAPIL telah mendekati target yang ditetapkan, meskipun belum sepenuhnya tercapai. Hal ini disebabkan oleh masih perlunya peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural ASN secara merata, serta optimalisasi implementasi nilai-nilai dasar ASN dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Selain itu, masih terdapat kebutuhan akan peningkatan budaya kerja berbasis kinerja

dan penguatan sistem pengembangan karier berkelanjutan termasuk pengiriman Diklat PIM bagi pejabat Struktural di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri.

8. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan dokumen KTP el" adalah sebesar 99.90 % dari target yang direncanakan sebesar 97.75 persentase capaian kinerjanya adalah 102.2 %, menunjukkan kinerja sangat baik dalam penerbitan KTP-el. Keberhasilan ini didukung oleh strategi pelayanan proaktif seperti jemput bola, peningkatan akses masyarakat terhadap layanan, serta tersedianya blanko dan sarana pendukung yang memadai termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa
9. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan dokumen KK" adalah sebesar 99.87 % dari target yang direncanakan sebesar 97.75 persentase capaian kinerjanya adalah 102.17 %, menunjukkan keberhasilan dalam memperluas kepemilikan dokumen KK. Faktor pendukungnya antara lain optimalisasi pelayanan digital, jemput bola ke wilayah terpencil, serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya dokumen kependudukan termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa
10. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)" adalah sebesar 99.16 % dari target yang direncanakan sebesar 87 persentase capaian kinerjanya adalah 113.98 %, menunjukkan hasil yang sangat baik, di mana pelaksanaan penerbitan KIA telah melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini didukung oleh peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan layanan jemput bola ke sekolah-sekolah dan desa/kelurahan, kerja sama dengan instansi pendidikan,

serta integrasi layanan penerbitan KIA dengan pelayanan akta kelahiran. Selain itu, dukungan sarana dan prasarana pelayanan serta kesadaran orang tua terhadap pentingnya KIA turut mendorong pencapaian initermasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa

11. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan Akta Kelahiran (0-18 tahun)" adalah sebesar 99.93 % dari target yang direncanakan sebesar 97.35 persentase capaian kinerjanya adalah 102.65 %, bahwa pelayanan penerbitan akta kelahiran telah berjalan sangat baik dan melebihi target yang ditetapkan. Hal ini didukung oleh peningkatan pelayanan berbasis digital, kerja sama dengan fasilitas kesehatan dan instansi pendidikan dalam penerbitan akta kelahiran secara kolektif, serta pelaksanaan layanan jemput bola ke wilayah-wilayah terpencil. Selain itu, peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen akta kelahiran juga turut mendorong pencapaian ini termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa.
12. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan Akta Kelahiran" adalah sebesar 54.63 % dari target yang direncanakan sebesar 50.50 persentase capaian kinerjanya adalah 108.18 %, keberhasilan pelayanan akta kelahiran. Pencapaian ini didukung oleh pelayanan kolektif melalui kerja sama lintas sektor, digitalisasi layanan, serta kesadaran masyarakat yang semakin tinggi terhadap pentingnya dokumen kependudukan ini termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa

13. Capaian kinerja indikator "Persentase kepemilikan Akta Kematian" adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 88.63 persentase capaian kinerjanya adalah 112.83 bahwa layanan pencatatan kematian telah dilaksanakan secara optimal dan melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini dipengaruhi oleh peningkatan sosialisasi pentingnya akta kematian, kemudahan prosedur pelayanan, pelaksanaan layanan jemput bola, serta integrasi layanan akta kematian dengan fasilitas kesehatan, rumah sakit, dan kelurahan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kematian untuk **pengurusan hak-hak hukum** turut mendukung pencapaian ini termasuk pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri, Desa Nyawiji Migunani yang penyelesaian Adminduk bisa diselesaikan di Desa
14. Capaian kinerja indikator "Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan" adalah sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 90.39 persentase capaian kinerjanya adalah 110.63 bahwa seluruh perangkat daerah telah menggunakan data kependudukan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan. Capaian ini didukung oleh peningkatan integrasi sistem informasi antar perangkat daerah, dukungan regulasi dan kebijakan pemanfaatan data NIK, serta koordinasi yang intensif antara DISDUKCAPIL dengan perangkat daerah pengguna data. Selain itu, peningkatan pemahaman dan kesadaran perangkat daerah akan pentingnya data kependudukan dalam mendukung pelayanan publik yang tepat sasaran turut berkontribusi terhadap pencapaian ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Wonogiri (Renstra Periode yang Lalu)

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKR	Target Indikator Lainnya	Target Renstra - PD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
1	2		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Persentase kepemilikan dokumen KTP-el				99.31	99,36	99,41	98	99,46	99,42	99,56	99,55	99,90		100,11	100,20	100,14	100,59	
2	Persentase kepemilikan dokumen KK (Kartu Keluarga)				99.31	99,36	99,41	98	99,46	99,37	99,97	99,71	99,87		100,06	100,61	100,30	101,90	
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)				78	82	40	88	88	86	86,49	94,09	99,16		110,26	105,48	235,23	112,68	
4	Persentase kepemilikan Akta Kelahiran (0-18)tahun				95.57	96,28	96,99	97,70	97,70	99,91	98,50	99,70	99,93		104,54	102,30	102,79	102,28	
5	Persentase kepemilikan dokumen Akta Kelahiran				48	49	49	51	51	50,30	51,36	53,68	54,63		104,79	104,41	109,55	107,11	
6	Persentase kepemilikan dokumen Akta Kematian				84.35	86,03	87,75	89,50	89,50	97,20	100	100	100		115,24	116,25	113,96	111,73	
5	IKM				80	83	89	40	50	90,14	92,04	95,45	81,45		112,68	110,90	107,26	203,62	
6	Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan data kependudukan				69.23	80,77	80,77	100	100	69,23	69,23	80,77	100		100,00	85,73	100,00	100	

2.3. Isu isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Perangkat Daerah di masa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Adapun isu-isu penting di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan Administrasi Kependudukannya, di antaranya:

1. Koordinasi dan Integrasi Sistem Masih Kurang
 - a. Kurangnya koordinasi antara instansi, seperti kecamatan, desa, operator SIAK, menyebabkan tumpang tindih fungsi dan keterlambatan layanan.
 - b. Sebelum aplikasi KONSULKAN, konsultasi hanya dilakukan tatap muka, belum berbasis online, memperlambat penyelesaian permasalahan
2. Ketimpangan Infrastruktur dan Teknologi

Infrastruktur teknologi di beberapa desa belum memadai seperti akses internet dan perangkat pengelola SIAK sehingga inovasi layanan berbasis digital sulit dijalankan.
3. Rendahnya Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat

Banyak warga yang belum memahami prosedur pengurusan dokumen serta pentingnya kepemilikan dokumen adminduk, seperti KTP, KK, KIA, akta kelahiran, dan akta kematian.

4. Kasus Perkawinan Tidak Tercatat

Banyak pasangan yang menikah secara agama (siri) tanpa pencatatan resmi menyebabkan ketidaklengkapan dokumen seperti akta kelahiran anak dan KK. Proses isbat nikah terpadu diperlukan sebagai solusi

5. Kapabilitas Petugas Perlu Ditingkatkan

Masih ditemukan kendala seperti keterampilan operator desa/kecamatan yang belum optimal dalam penggunaan aplikasi (SIAK, KONSULKAN), serta sistem yang sering error.

6. Efisiensi Administrasi dan Layanan Inovatif

- a. Inovasi seperti Desa Nyawiji Migunani dan efektif meningkatkan akses layanan di desa, tapi belum merata ke seluruh desa
- b. Program jemput bola seperti perekaman KIA serentak berhasil (1.831 anak dalam sehari) menunjukkan potensi, namun perlu perluasan cakupannya.

1.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada rancangan awal Rencana kerja 2026, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengusulkan anggaran sebesar Rp. 8.914.078.856,- (Delapan milyar Sembilan ratus empat belas juta tujuh puluh delapan ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) Namun dalam proses perjalanan penganggaran sampai dengan Rancangan akhir terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi hal tersebut antara lain:

1. Pada rancangan awal Rencana kerja 2026, OPD juga berdasarkan realisasi dan plafon anggaran tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan skala prioritas dan analisis kebutuhan dan beban kerja.

2. Terdapat Effisiensi anggaran dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana Program dan kegiatan RKPD
3. Di dalam pelaksanaan Pelayanan Administrasi Kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri sudah tidak mendapatkan Dana Alokasi Khusus Non Fisik (DAK Non Fisik) dari Kementerian Dalam Negeri Ditjen Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026 Kabupaten Wonogiri

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan Penting
	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Progam/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Wonogiri	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	45.665,279	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kab. Wonogiri	Persentase tertib laporan kinerja administrasi pemerintahan daerah	100 Persen	5.399,962.966	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri			65.565,279	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100 Persen	6.997.500	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	20,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	4.997.500	

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	20,665,544	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan	1,000,000	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	4,999,735	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan	1,000,000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri		14 kali	4,359,856.392	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	100 Persen	3.500.072.698	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Wonogiri	Jumlah gaji dan tunjangan bagi ASN yang terbayarkan selama 1 tahun	280 Orang/bulan	4,357,856.594	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Wonogiri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	280 Orang/bulan	3.498.183.811	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 Dokumen	1,999,798	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	20 Dokumen	1.888.887,	

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri		100	298.533.050,	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase peningkatan SDM perangkat daerah yang sesuai tugas dan fungsi	100 Persen	147.391.790	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Wonogiri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	10.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kab. Wonogiri	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	5.000.000	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Wonogiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	288.533.050	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Wonogiri	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang	142.391.790	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri		100	1.299.704.679	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase peningkatan kinerja administrasi umum	100 Persen	367.128.978	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket	7.495.477	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	14 Paket	5.000.000,	

	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	1.053.098.187	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Wonogiri	yang Disediakan	10 Paket	254.104.978,	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	7.032.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 Paket	9.999.000	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	19.999.851	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Wonogiri	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	41.525.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	6.212.500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan	20.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	205.866,664	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	36.500.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100	1.476.703.843	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100 Persen	1.253.372.000	

	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	200 laporan	2,000,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan	290,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Wonogiri	Jumlah jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang terpenuhi dalam 1 tahun	4 Rekening	312,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	1,185,703.843	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Wonogiri	Jumlah alat kebersihan kantor dan bahan pembersih yang tersedia	25 jenis	939,372,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100	87,996,496	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Wonogiri	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	100 Persen	125,000,000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Wonogiri	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	47,999,296	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Wonogiri	Jumlah kendaraan dinas operasional yang terpelihara	20 Unit	60,000,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Wonogiri	Jumlah Peralatan dan Mesin	15 Unit	9,997,200	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Wonogiri	Jumlah Peralatan dan	15 Unit	15,000,000	

Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	38,724,792	Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Wonogiri	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	12 Laporan	108.997.070
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Wonogiri	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10000 Dokumen	74,964,890	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	10000 Dokumen	27.410.940
PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Wonogiri	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100	100.514.616	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Kab. Wonogiri	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	100	486.477.240
Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Wonogiri	Pelayanan Pencatatan Sipil	21000 Kutipan	100.514.616	Pelayanan Pencatatan Sipil	Kab. Wonogiri	Jumlah pelayanan pencatatan sipil	21000 Kutipan	486.477.240
Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Wonogiri	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	35000 Dokumen	35.779,830	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Wonogiri	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	25000 Dokumen	132.712.490

1.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta berbagai aturan di bawahnya, penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tahun 2026 merupakan kegiatan berkesinambungan dari kegiatan sebelumnya.

Kebijakan Nasional dalam pengelolaan administrasi kependudukan adalah:

1. Percepatan Transformasi Digital Administrasi Kependudukan Ditjen Dukcapil menekankan:
 - a. Pengintegrasian data kependudukan lewat sistem seperti INAgov, INApas, dan INAku sebagai bagian dari Portal Administrasi Pemerintahan (PAP).
 - b. Aktivasi dan perluasan penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan target minimal 30 penggunanya adalah perekaman KTP-el.
 - c. Digitalisasi layanan dan penerapan Single Sign-On (SSO) serta SPBE yang terintegrasi.
2. Integrasi Sistem dan Satu Data Kependudukan
 - a. Penguatan integrasi data registrasi penduduk dan statistik hayati melalui satu data kependudukan, memanfaatkan NIK sebagai kunci integrasi nasional.
 - b. Pembangunan koneksitas data ke data warehouse nasional untuk mendukung akurasi dan integrasi antar instansi.
3. Perluasan Cakupan Administrasi Kependudukan
Target nasional selanjutnya:
 - a. Mendekati atau mencapai kepemilikan dokumen KTP-el, KK, Akta Kelahiran, Akta Kematian, dan dokumen lainnya mendekati 100.

- b. Penekanan pada layanan kolektif, pendekatan jemput bola, dan inovasi dalam pelayanan di wilayah
- 4. Penyusunan Regulasi Kebijakan Responsif dan Berkeadilan
 - a. Penyempurnaan regulasi terkait pelayanan KTP-el dan IKD berdasarkan Permendagri 72/2022 dan Permendagri 109/2019.
 - b. Pendekatan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang inklusif dan menjangkau semua masyarakat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan PP 102 Tahun 2011 tentang Perubahan atas PP Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tentunya perlu diganti yang sesuai dengan kebutuhan sekarang ini.

Bupati/wali kota menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan di daerah kabupaten/kota.

Dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bupati/wali kota memiliki kewenangan meliputi:

1. Koordinasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
2. Pembentukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota;
3. Pengaturan teknis penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan;
5. Pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
6. Penugasan kepada desa atau yang disebut dengan nama lain untuk menyelenggarakan sebagian urusan Administrasi Kependudukan;

7. Penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten/kota yang berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan (DKB) oleh Kementerian;
8. Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan. Dalam menentukan arah kebijakan harus mengacu pada indikator strategis yang sudah ditetapkan dengan selalu mewujudkan suatu harapan dan tantangan yang hendak dicapai namun tidak terlepas adanya permasalahan dan tantangan oleh sebab itu dibutuhkan kesamaan langkah dengan menggandeng seluruh lapisan masyarakat seluruh stake holder maupun masyarakat antara lain dengan cara Meningkatkan mutu pelayanan administrasi kependudukan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Berikut sasaran target indikator kinerja perangkat daerah yang mengacu pada tujuan Renstra Perangkat Daerah

Tabel T.C.32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2026

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Wonogiri

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	NIHIL				

INDIKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

No	Indikator Kinerja PD yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	Satuan	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD		Target Capaian Setiap Tahun						Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	9
	Mewujudkan Pelayanan Publik bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang prima; mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik										
1	Indeks Pelayanan Publik Bidang kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Angka	4.39	4,463	4,463	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
	Meningkatnya tertib administrasi kependudukan										
1.	Persentase Kepemilikan Dokumen KTP el	Persen	99.41	99.41	99.41	99,46	99,50	99,55	99,60	99,65	99,50
2	Persentase Kepemilikan Dokumen KK	Persen	99.41	99.41	99.46	99.46	99,50	99,55	99,60	99,65	99,65
3	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	Persen	86	88	88	90	95.60	95.65	95.70	95.70	95.70
4	Persentase kepemilikan akte kelahiran (0-18 tahun)	Persen	96.99	97.70	97.70	98,41	99	99,50	99.70	99.80	99.80
5	Persentase kepemilikan akte kelahiran	Persen	50	51	51	52	53	53.50	54	54.50	54.50
6	Persentase kepemilikan akte kematian	Persen	87.75	89.50	89.50	90	100	100	100	100	100
7	Persentase perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan	Persen	88.64	100	100	100	100	100	100	100	100
	Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah										
1.	IKM Perangkat Daerah	Angka	89	86	86	89,50	89,75	90	90,25	90,50	90.50

unsur pelaksana Pemerintah Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembantuan di bidang kependudukan dan Pencatatan sipil.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud, setiap penyusunan rencana kerja senantiasa memperhatikan usulan atau aspirasi masyarakat. Namun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak mengakomodir usulan program/kegiatan masyarakat melalui musrenbang desa/kelurahan dan kecamatan. Hal ini mengingat bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki tugas menerbitkan dokumen kependudukan atas terjadinya peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di seluruh wilayah Kabupaten Wonogiri

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah

Penelaahan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun Anggaran 2026 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan usulan Rencana Kerja tahun 2026 merupakan kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri antara lain

1. Program Pendaftaran Penduduk

Program Pendaftaran Penduduk mempunyai indikator yaitu persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk, 1 kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dengan sumber dana yang berasal dari APBD sejumlah Rp. 330.983.800,-

Didukung oleh 2 sub kegiatan yakni:

a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

1) Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dengan target capaian jumlah 10.000 Dokumen dan didanai dari sumber dana APBD sebesar Rp. 2.295.000,-

2) Indikator kegiatan Jumlah dokumen hasil pencatatan penatusahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk dengan target capaian sebesar 207.500 dokumen dan didanai dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 215.672.800,-

b. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Indikator kegiatan: Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk dengan target capaian 12 laporan dan didanai dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 113.016.000,-

2. Program Pencatatan Sipil

Program Pencatatan Sipil mempunyai indikator yaitu persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil, satu kegiatan yaitu Pelayanan Pencatatan Sipil dengan sumber dana yang berasal dari APBD sejumlah Rp. 361.816.000 Didukung dengan 2 sub kegiatan yakni:

- a. Sub Kegiatan Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
Indikator sub kegiatan yaitu Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting dengan target capaian 27.500 dokumen dan didanai dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 118.692.500,-
- b. Sub Kegiatan ; Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
Indikator Sub Kegiatan yaitu Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang ditingkatkan dengan target capaian 11 layanan dan didanai dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 243.123.500,-

3. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan mempunyai indikator yaitu Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data, terdapat kegiatan yaitu Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan sumber dana yang berasal dari APBD sejumlah Rp. 452.661.500.-

Kegiatan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, terdapat 2 sub kegiatan yakni:

- a. Sub Kegiatan Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan target capaian 4 laporan dan didanai dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 233.971.500

- b. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan target capaian 22 dokumen dan didanai dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 218.690.000,-

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator yaitu Persentase fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan umum, terdapat 6 kegiatan dengan target capaian program sebesar 100 dengan dana sebesar Rp. 5.490.639.450,-.

Adapun kegiatan, sub kegiatan, target dan pendanaan dari program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dijelaskan secara rinci sebagaimana di bawah ini:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Indikator Kegiatan: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Target capaian: 7 Dokumen

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 4.997.500,-

- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Indikator Kegiatan: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
Target capaian: 2 Laporan
Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp.1.000.000,-
 - c. Sub Kegiatan: Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Kegiatan:Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Target capaian: 10 Laporan
Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp.1.000.000,-
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Indikator Kegiatan: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN Target capaian: 280 orang/bulan
Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 3.600.269.000,-
 - b. Sub kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Target capaian: 20 Dokumen
Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 1.888.000,-
3. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Indikator Kegiatan: Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan pelatihan
Target capaian: 5 orang

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp.5.000.000,-

b. Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Target capaian: 150 orang

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 114.145.000,-

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan

Target capaian: 14 Paket

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 5,000,000

b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Indikator Kegiatan: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan

Target capaian: 10 Paket

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 300.523.950,-

c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan

Target capaian: 24 Paket

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 9,999,000,-

d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

- Indikator Kegiatan: Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan
Target capaian: 6 Paket
Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 11.945.000,-
- e. Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu Target capaian: 12 Laporan
Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 20.000.000,-
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Target capaian: 12 Laporan
Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 36,500,000
5. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Target capaian: 12 Laporan
Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 2,000,000
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan
Target capaian: 4 laporan
Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp.312,000,000,-
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan

Target capaian: 12 laporan

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 939,372,000,-

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah

a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah kendaraan dinas operasional yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanya

Target capaian: 20 Unit

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp. 60.000.000,-

b. Sub Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara

Target capaian: 15 Unit

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp15,000,000,-

c. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Target capaian: 3 Unit

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri sebesar Rp 30,000,000,-

d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi

Target capaian: 112 Unit

Sumber Dana berasal dari APBD Kab. Wonogiri
sebesar Rp. 20,000,000,-

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE PENITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANJAWA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERAKORAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAQU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAQU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Menerima dan dan Tunjangan ASN				280 Orang/bulan	3.600.269.000.00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Mempkuat Lembaga Tata Kelola Pemerintah daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi olahraga, keselamatan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pan yangang disabilitas.	Penguatan Lembaga Tata Kelola Pemerintah daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi olahraga, keselamatan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pan yangang disabilitas.	OPD DAN DINAS TERKAIT Kab. Wonorejo		3.600.269.000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
	2.12.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akreditasi SKPD					20 Daunan	1.888.000.00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Mempkuat Lembaga Tata Kelola Pemerintah daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi olahraga, keselamatan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pan yangang disabilitas.	Penguatan Lembaga Tata Kelola Pemerintah daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi olahraga, keselamatan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pan yangang disabilitas.	OPD DAN DINAS TERKAIT Kab. Wonorejo		1.888.000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
			Jumlah Dokumen Akreditasi dan Pelaksanaan Akreditasi SKPD													

NO	KODE	URUTAN / BIDANG URUTAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARUET AKHIR PERIODE RENTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARUET RENTAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANOKA PENDANAAN						KELOMPOK MABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANOKAT DAERAH PENANOGUNO JAWAB
							TARUET 2025	PAUO INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARUET	PAUO INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.12.01.2.05	Administrasi Kependudukan Perangkat Daerah	Persentase Pengetahuan SDM/ Perangkat Daerah sesuai Tugas dan Fungsi	-			100 %	119.145.000.00				Penguatan Layanan Tata Kelola Pemerintah dan Berbasis (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi dan yang kesejahteraan gender, serta penguatan peran para masyarakat, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan peran pendukung disabilitas.	ASN/ NON ASN/ OPD TERKAIT		119.145.000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
	2.12.01.2.05.0009		Jumlah Pegawai/ Berkas Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				5 Orang	5.000.000.00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Memperkuat tindakan dan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi dan yang kesejahteraan gender, serta penguatan peran para masyarakat, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan peran pendukung disabilitas.	Penguatan Layanan Tata Kelola Pemerintah dan Berbasis (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi dan yang kesejahteraan gender, serta penguatan peran para masyarakat, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan peran pendukung disabilitas.	ASN/ NON ASN/ OPD TERKAIT		5.000.000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
	2.12.01.2.05.0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REINTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REINJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REINJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANJAWA PENDANAAN						KELOMPOK BARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANOKAT DAERAH PENANOOUNO JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4 Jumlah Orang yang Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perencanaan-Undangan	5	6	7	150 Orang	114.145.000.00	10	11	12	13	14	15	16	17
									Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan dan Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan tumbuhan dan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi, daya yang dibutuhkan keselamatan gender, serta penguatan peran pere mpuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yandang disabilitas	Pengutan Lansaan Tata Kelola Pemerintah an Berling mas Dan Dynamis 7. Pengutan tata kelola pemerintah an yang keselamatan dibutuhkan gender, transparan dan partisipatif	ASIN/ NON ASIN/ OPD TERKAIT		114.145.000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase peningkatan kualitas administrasi umum	-			100 %	383.967.950.00				Pengutan Lansaan Tata Kelola Pemerintah an Berling mas Dan Dynamis 7. Pengutan tata kelola pemerintah an yang keselamatan dibutuhkan gender, transparan dan partisipatif	OPD		383.967.950.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0001		Penyediaan Kumpulan Instansi Lisrik Perangkat Bangunan Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REMITRA OPD	REALISASI CAPAIAN REMITRA TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANOMBA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2028	PAQU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS						
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	Jumlah Paket Komoditas Indikasi Lokal/Perdagangan Sesuai Kantor yang Disediakan	5	6	7	14 Paket	5.000.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	11	12	13	14	15	16	17
																	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	2.12.01.2.06.0002	Penyediaan Perlengkapan dan Perlengkapan Kantor						10 Paket	300.523.950,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA					300.523.950,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
			Jumlah Paket Perawatan dan Perawatan Kantor yang Disediakan														
	2.12.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															

NO	KODE	URUTAN / BIDANG URUTAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENTAN OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAQU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAQU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Petak Bawah Logistik Kantor yang Disiapkan				24 Petak	9.999.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Mempunyai tambahan sumber dana manusia dan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi dan daya ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan SDM	Pengutan Layanan Tata Kelola Pemerintah dan Dinas Dinas Dan Dinas Dinas	OPD		9.999.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0008 Penyediaan Barang Cetak dan Pengiriman																
			Jumlah Petak Bawah Cetakan dan Pengiriman yang Disiapkan	6 Petak				11.945.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Mempunyai tambahan sumber dana manusia dan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, produksi dan daya ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam pengelolaan sumber daya manusia dan SDM	Pengutan Layanan Tata Kelola Pemerintah dan Dinas Dinas Dan Dinas Dinas	OPD		11.945.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.01.2.06.0008 Fasilitas Kunjungan Tamu																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANOKA PENDANAAN						MELOMPOK SAJARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2028	PAOU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAOU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Realisasi/ Kunjungan Tamu				12 Laporan	20.000.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Mempunyai tambahan sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi, pendidikan, kegiatan, prestasi dan yang kegiatan gubernur, serta pengkatan peran para masyarakat (generasi milenial dan generasi Z), dan dan yang yang disabilitas.	Pengkatan Layanan Tata Kelola Pemerintah dan Bermitra Rias Dan Dinas 7 Pengkatan tata kelola pemerintah dan yang kegiatan akurabel, transparan dan partisipatif	OPD		20.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
2.12.01.2.06.0009																
			Jumlah Laporan Penyusunan Riset Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	36.500.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Mempunyai tambahan sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi, pendidikan, kegiatan, prestasi dan yang kegiatan gubernur, serta pengkatan peran para masyarakat (generasi milenial dan generasi Z), dan dan yang yang disabilitas.	Pengkatan Layanan Tata Kelola Pemerintah dan Bermitra Rias Dan Dinas 7 Pengkatan tata kelola pemerintah dan yang kegiatan akurabel, transparan dan partisipatif	OPD		36.500.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL

NO	KODE	URUTAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RESTRANSI OPD	REALISASI CAPAIAN RESTRANSI TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANOKA PENANAMAN							KELOMPOK MABARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2028	PAQU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAQU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	Jumlah Laporan Penyelidikan Jasa Komunitas Sumber Daya Air dan Lstrik yang Disediakan	5	6	7	8 4 Laporan	9 312.000.000.00	10 Kab. Wonoregi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	11 SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	12 Mempunyai tambahan sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi dan yang akumulatif, gubernur, transparan dan partisipasi	13 Pengatan Lansitan Tata Kelola Pemerintah an Berimbang Dinamist 7.	14 OPD	15 16 312.000.000.00	17 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		
2.12.01.2.08.0004 Penyelahan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
			Jumlah Laporan Penyelahan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	939.372.000.00	Kab. Wonoregi, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Mempunyai tambahan sumber daya manusia (SDM), sarana, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi dan yang akumulatif, gubernur, transparan dan partisipasi	Pengatan Lansitan Tata Kelola Pemerintah an Berimbang Dinamist 7.	OPD		939.372.000.00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	

NO	MODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REMITRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAN CAPAIAN TARGET RENTJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SABARAN	PRAKIRAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAOU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAOU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.01.2.09		Pembinaan Bidang Mita Daerah Penunjang Usaha Pemerintahan Daerah	Persentase sertifikasi barang milik daerah	-			100 %	125.000.000,00			Membantu 1 pendamping dan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi dan yang akumulasi akumulasi, transparan dan serta pengkatan peran para masyarakat pemerintah (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yang stabilitas.	OPD			125.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
2.12.01.2.09.0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Penghasilan Kantor Dinas Operasional dan Lapangan														
		Jumlah Ketersediaan Dinas Operasional dan Lapangan yang Diselenggarakan dan diselenggarakan oleh Pemerintah		20 Unit				60.000.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN SEBELUMNYA	Membantu 1 pendamping dan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, keselamatan, prestasi dan yang akumulasi akumulasi, transparan dan serta pengkatan peran para masyarakat pemerintah (generasi milenial dan generasi Z), dan pen yang stabilitas.	OPD			60.000.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL
2.12.01.2.09.0006		Pembinaan Perawatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUJAN / BIDANG URUJAN PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE REMITRA OPD	REALISASI CAPAIAN REMITRA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK BARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAOU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Pendaftaran dan Pendaftaran Dokumen Akta Pendaftaran Penduduk				207500 Dokumen	215.672.800,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat 1. Pembangu- naan sumber daya masyarakat (SDM), 2. Kesehatan, 3. Pendidikan, 4. Teknologi, 5. Kesehatan, 6. Tata Kelola pemerintah dan yang keterkaitan akutabel, 7. Gender/ serta pengkatan peran peme- mpuan, 8. Pemuda (generasi milenial) dan generasi Z), dan pen- yandang dibawahnya.	Pengkatan Layanan Tata Kelola Pemerintah dan yang keterkaitan akutabel, 7. Gender/ serta pengkatan peran peme- mpuan, 8. Pemuda (generasi milenial) dan generasi Z), dan pen- yandang dibawahnya.	1. Penduduk wajib KTP, KK, KIA 2. Masyarakat melaksanakan pelayanan akutabel 3. Penduduk yang mengajukan permohonan	215.672.800,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0004	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				12 Laporan	113.016.000,00	Kab. Wonorejo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat 1. Pembangu- naan sumber daya masyarakat (SDM), 2. Kesehatan, 3. Pendidikan, 4. Teknologi, 5. Kesehatan, 6. Tata Kelola pemerintah dan yang keterkaitan akutabel, 7. Gender/ serta pengkatan peran peme- mpuan, 8. Pemuda (generasi milenial) dan generasi Z), dan pen- yandang dibawahnya.	Pengkatan Layanan Tata Kelola Pemerintah dan yang keterkaitan akutabel, 7. Gender/ serta pengkatan peran peme- mpuan, 8. Pemuda (generasi milenial) dan generasi Z), dan pen- yandang dibawahnya.	1. Penduduk wajib KTP, KK, KIA 2. Masyarakat melaksanakan pelayanan akutabel 3. Penduduk yang mengajukan permohonan	113.016.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	
	2.12.02.2.01.0005	Pencatatan, Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PEMANGGUNG JAWAB
							TARGET 2028	PAOU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAOU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah Dokumen Pencatatan, Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen Atas Penerimaan Persewa Aspek Pengukuran				10000 Dokumen	2.295.000,00	Kab. Wonorejo, Kecamatan, dan Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), teknologi, pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, dan integritas aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas melaksanakan pelayanan publik serta penguatan peran para mitra, pemuda, perempuan, milenial, dan generasi disabilitas	Penguatan Layanan Tata Kelola Pemerintahan dan Berbasis Digital (SDM), Organisasi, dan Penguatan tata kelola pemerintahan, profesionalitas, dan integritas aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas melaksanakan pelayanan publik serta penguatan peran para mitra, pemuda, perempuan, milenial, dan generasi disabilitas	1. Penduduk wajib KTP, KK, KIA 2. Masyarakat atau individu yang memiliki hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat yang mengakui yang mengakui		2.295.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
3.	2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan pendaftaran sipil	-			100 %	581.816.000,00						-	581.816.000,00		
		[Meningkatkan kualitas layanan pencatatan sipil]	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran sipil	100	100	100	100	581.816.000,00						-	581.816.000,00		
2.12.03.2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil	-			27500 Kuitipan	361.816.000,00			Memperkuat dan meningkatkan sumber daya manusia (SDM), teknologi, pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, dan integritas aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas melaksanakan pelayanan publik serta penguatan peran para mitra, pemuda, perempuan, milenial, dan generasi disabilitas	Penguatan Layanan Tata Kelola Pemerintahan dan Berbasis Digital (SDM), Organisasi, dan Penguatan tata kelola pemerintahan, profesionalitas, dan integritas aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas melaksanakan pelayanan publik serta penguatan peran para mitra, pemuda, perempuan, milenial, dan generasi disabilitas	Sekolah Masyarakat Kelurahan Wonorejo	-	361.816.000,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	
		Pencatatan, Pendaftaran dan Penyerahan Dokumen Atas Penerimaan Persewa Persewa															
		2.12.03.2.01.0001															

NO	KODE	URUTAN / BIDANG URUTAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENTAN OPD	REALISASI CAPAIAN RENTAN TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANOKA PENDANAAN						KELOMPOK BARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2028	PAUO NOKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAUO INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.12.04.2.03		Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah pendaftaran informasi administrasi kependudukan	-			25 Mendatar	452.661.500,00				Pengisian Lembaran Tata Kelola Pemerintahan dan Berlinggah dan Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	452.661.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.003		Facilitas Tersat Pengumpulan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi / Pengumpulan Informasi Administrasi Kependudukan				4 Laporan	239.971.500,00	Kab. Wonoreg, Kab. Jember, Kab. Probolinggo, Kab. Kudu		Membantu tumbuhnya jumlah pendaftaran informasi kependudukan (SDM), kesehatan, pendidikan, kegiatan, prestasi, olahraga, keselamatan gender, serta penggunaan peran serta masyarakat dalam kegiatan kependudukan dan generasi Z, dan dan vandang diabilitas.	Pengisian Lembaran Tata Kelola Pemerintahan dan Berlinggah dan Dinas	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		219.961.500,00	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04.2.03.004		Penyelenggaraan Pemeliharaan Data Kependudukan														

BAB IV

PENUTUP

4.1. Catatan penting

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Kabupaten/ Wonogiri untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Wonogiri dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan sipil dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri 2025-2029. Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahunan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil

Dengan Program sejumlah 4 Kegiatan 9 ditambah Sub Kegiatan 27 ini tetap mengacu pada Prioritas Pembangunan Daerah yang sudah termuat dalam Rencana Strategis Bappeda dan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 – 2029.

4.2. Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 merupakan penjabaran Renstra 2025-2029 dari visi, misi, dan program Bupati dan Wakil Bupati hasil Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada Tahun 2024 dan telah dituangkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 – 2029. Dokumen Rancangan renja ini merupakan pedoman Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten

Wonogiri. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 – 2029 dengan sebaik-baiknya;
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang disusun dengan berpedoman pada Renstra dan RPJMD Kabupaten Wonogiri Tahun 2025 – 2029;

4.3. Rencana Tindak Lanjut

Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonogiri Tahun 2026 merupakan indikator dalam proses evaluasi laporan pelaksanaan atas kinerja tahunan, sehingga dapat meminimalisir pelaksanaan kegiatan yang menyimpang dari Dokumen Renstra terutama pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2025 – 2029 Wonogiri mengangkat visi **Wonogiri Berdaya Saing, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan**

4.4 Manajemen Risiko Pada Program

Manajemen Risiko pada Program di Disdukcapil Manajemen risiko Disdukcapil Kabupaten Wonogiri pada tingkatan Program dan Kegiatan. Terdapat 4 program yang perlu dilakukan manajemen risiko

No	Program	Indikator Kinerja	Risiko				Sebab
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	
				Risiko			
a	b	c	d	e	f	g	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota	Persentase Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah	Keterlambatan dalam pengumpulan data	ROO.24.12.14.01	Sekretaris	Banyaknya Laporan Eksternal yang harus dicukupi	
2	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	Kurang maksimalnya cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk	ROO.24.12.14.02	Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	adanya anggapan masyarakat bahwa dokumen pendaftaran kependudukan bukan suatu kebutuhan yang mendesak	
3	Program Pencatatan Sipil	Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil	Kurang maksimalnya cakupan kepemilikan dokumen akta pencatatan sipil	ROO.24.12.14.03	Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	adanya anggapan masyarakat bahwa dokumen Pencatatan sipil bukan suatu kebutuhan yang mendesak	
4	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data	tidak terjalinya kerjasama pemanfaatan data dinas dukcapil dengan OPD lain.	ROO.24.12.14.04	Bidang PIAK dan PD	Adanya regulasi yang mengharuskan OPD yang memanfaatkan data menggunakan standar sertifikasi ISO 27000	

Tabel 4. 4 Manajemen Risiko Pada Program di DISDUKCAPIL Kabupaten Wonogiri

Dapat kami uraikan per Programnya sebagai berikut

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota Indikator kinerja program ini adalah ketercukupan Tertib Pelaporan Kinerja Administrasi Pemerintahan Daerah. Risiko yang dihadapi adalah Keterlambatan dalam pemenuhan dokumen laporan Keterlambatan dalam pemenuhan dokumen laporan Keterlambatan dalam pengumpulan data internal (kategori C), dengan dampak berupa Keterlambatan dalam pemenuhan dokumen laporan Pihak yang terdampak adalah Sekretaris Dinas serta Kepala Dinas
2. Program Program Pendaftaran Penduduk Indikator kinerjanya adalah Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk Risiko yang muncul adalah Kurang maksimalnya cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk(kategori C) adanya anggapan masyarakat bahwa dokumen pendaftaran kependudukan bukan suatu kebutuhan yang mendesak. Pihak yang terkena dampak yaitu Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk serta Kepala Disdukcapil
3. Program Program Pencatatan Sipil Indikator kinerjanya adalah Persentase cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil Risiko yang muncul adalah tidak tercapainya 100% cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil (kategori C) adanya anggapan masyarakat bahwa dokumen pendaftaran kependudukan bukan suatu kebutuhan yang mendesak. Pihak yang terkena dampak yaitu Bidang Pencatatan Sipil serta Kepala Disdukcapil
4. Program PIAK dan PD Indikator kinerjanya adalah Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data (kategori C)

Adanya regulasi yang mengharuskan OPD yang pemanfaatan data menggunakan standar sertifikasi ISO 27000 Pihak yang terkena dampak yaitu PIAK dan PD dan OPD

4.5 Manajemen Risiko Pada Kegiatan di DISDUKCAPIL

Manajemen risiko Disdukcapil Kabupaten Wonogiri pada tingkatan Kegiatan. Terdapat 9 Kegiatan yang perlu dilakukan manajemen risiko adalah pertama, Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah, kedua, Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, ketiga, Administrasi kepegawaian perangkat daerah, keempat, Administrasi umum perangkat daerah, kelima Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah), keenam, Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, ketujuh, Pelayanan Pendaftaran Penduduk, kedelapan, Pelayanan Pencatatan Sipil Kesembilan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Dokumen ini merupakan hasil identifikasi dan penilaian risiko kegiatan pada Disdukcapil Kabupaten Wonogiri. Setiap kegiatan dianalisis berdasarkan indikator kinerja, potensi risiko, penyebab, kategori sumber risiko, dan dampaknya.

Tabel 4. 5 Manajemen Risiko Pada Kegiatan di DISDUKCAPIL Kabupaten Wonogiri

No	Kegiatan	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
				Risiko						
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	Tidak tepatnya waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi	ROO.24.12.14.01	Sekretaris	kurangnya koordinasi antar bagian	Internal	C	Pengumpulan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tidak tertib	Disdukcapil, OPD Terkait
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase administrasi keuangan daerah yang di susun	Kesalahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan	ROO.24.12.14.02	Sekretaris	kesalahan perhitungan	Internal	C	Laporan keuangan tidak valid	Disdukcapil, OPD Terkait
3	Administrasi kepegawaian perangkat daerah	Persentase peningkatan SDM perangkat daerah yang sesuai tugas dan fungsi	kinerja organisasi tidak maksimal dan terjadinya kesalahan dalam menjalankan tugas	ROO.24.12.14.03	Sekretaris	kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kulaitas SDM	Internal	C	penurunan produktivitas kinerja SDM	ASN
4	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase peningkatan kinerja administrasi umum	penurunan efisiensi dan efektivitas layanan	ROO.24.12.14.04	Sekretaris	kurangnya SDM yang memenuhi kompetensi	Internal	C	penurunan produktivitas dan tidak terpenuhinya target kinerja	Disdukcapil, OPD Terkait

5	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemeliharaan barang milik daerah	Penurunan efektivitas layanan publik karena barang atau peralatan yang tidak terawat sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.	ROO.24.12.14.05	Sekretaris	Kurangnya Anggaran Pemeliharaan	Eksternal	UC	Barang milik daerah menjadi cepat rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya	Disdukcapil, OPD Terkait
6	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	terganggunya pelaksanaan kegiatan dan pelayanan publik	ROO.24.12.14.06	Sekretaris	Kurangnya perencanaan yang efektif, Perencanaan yang kurang matang terkait kebutuhan dan penyediaan jasa penunjang, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan aktual	Internal	C	Menurunnya kualitas layanan publik	Disdukcapil, masyarakat
7	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah orang yang tertib adminduk	menurunnya jumlah penduduk yang tertib adminduk	ROO.24.12.14.07	Kabid Dafduk	Kesadaran Masyarakat Rendah: Beberapa orang mungkin tidak melihat urgensi atau manfaat	Eksternal	UC	Data Kependudukan Tidak Akurat: Ketidaksesuaian data di sistem kependudukan menyebabkan kebijakan publik dan	Disdukcapil, masyarakat

						langsung dari memiliki dokumen kependudukan yang lengkap dan up-to-date	Eksternal	UC	alokasi sumber daya yang kurang tepat sasaran	
8	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah pelayanan pencatatan sipil	tidak tercapainya target pelayanan pencatatan sipil	ROO.24.12.14.08	Kabid Capil	Anggapan bahwa dokumen pencatatan sipil hanya penting saat diperlukan untuk urusan tertentu, sehingga masyarakat tidak merasa perlu mengurusnya sejak awal	Eksternal	UC	Validitas data kependudukan yang rendah, Kesulitan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Peningkatan risiko hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki dokumen pencatatan sipil sah	Disdukcapil, OPD Terkait
9	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan	keterbatasan atau ketidaktersediaan informasi administrasi kependudukan	ROO.24.12.14.09	Kabid PIAK	keterbatasan akses pemanfaatan data pada sistem SIAK	Eksternal	UC	keterlambatan dalam pengumpulan dan pemutakhiran data kependudukan	Disdukcapil, OPD Terkait

1. Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah Indikatornya adalah Persentase penyusunan administrasi perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun. Risiko yang muncul yaitu Tidak tepatnya waktu penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi, disebabkan kurangnya koordinasi antar bagian. Risiko ini bersifat internal (kategori C) dan berdampak pada Pengumpulan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi tidak tertib terdampak: Disdukcapil, OPD Terkait
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Indikatornya Persentase administrasi keuangan daerah yang disusun Risiko muncul Kesalahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan ketika data SIPD tidak dapat dijadikan dasar perencanaan lanjutan, Kesalahan dalam Penyusunan Laporan Keuangan Risiko internal (C) ini menghambat Laporan keuangan tidak valid. Pihak terdampak: Disdukcapil, OPD Terkait
3. Kegiatan Administrasi kepegawaian perangkat daerah Indikatornya Persentase peningkatan SDM perangkat daerah yang sesuai tugas dan fungsi Risiko muncul kinerja organisasi tidak maksimal dan terjadinya kesalahan dalam menjalankan tugas. Risiko internal (C) ini kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Pihak terdampak: ASN.
4. Kegiatan Administrasi umum perangkat daerah Indikatornya Persentase peningkatan kinerja administrasi umum. Risiko terjadi penurunan efisiensi dan efektivitas layanan administrasi umum Risiko internal (C), berdampak Disdukcapil, OPD terkait
5. Kegiatan Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah Indikatornya Persentase pemeliharaan barang milik daerah. Risiko: Penurunan efektivitas layanan publik karena barang atau peralatan yang tidak terawat sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya.

akibat Kurangnya Anggaran Pemeliharaan Risiko internal (C), berdampak pada Barang milik daerah menjadi cepat rusak atau tidak berfungsi sebagaimana mestinya

6. Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah Indikatornya Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah infrastruktur. Risiko: terganggunya pelaksanaan kegiatan dan pelayanan Kurangnya perencanaan yang efektif, Perencanaan yang kurang matang terkait kebutuhan dan penyediaan jasa penunjang, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan aktual Risiko internal (C), berdampak pada Menurunnya kualitas layanan publik terdampak Disdukcapil, masyarakat.

7. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Indikatornya Jumlah orang yang tertib adminduk. Risiko menurunnya jumlah penduduk yang tertib adminduk, Kesadaran Masyarakat Rendah: Beberapa orang mungkin dokumen pencatatan sipil hanya penting saat diperlukan untuk urusan tertentu, sehingga masyarakat tidak merasa perlu mengurusnya sejak awal

Risiko eksternal (C), berdampak Data Data Kependudukan Tidak Akurat: Ketidaksesuaian data di sistem kependudukan menyebabkan kebijakan publik dan alokasi sumber daya yang kurang tepat sasaran terdampak Disdukcapil, masyarakat.

8. Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil Indikatornya Jumlah pelayanan pencatatan sipil. Risiko: tidak tercapainya target pelayanan pencatatan Anggapan bahwa dokumen pencatatan sipil hanya penting saat diperlukan untuk urusan tertentu, sehingga masyarakat tidak merasa perlu mengurusnya sejak awal Risiko eksternal (C), berdampak pada Validitas data kependudukan yang rendah, Kesulitan masyarakat dalam mengakses layanan publik. Peningkatan risiko hukum bagi masyarakat yang tidak memiliki dokumen pencatatan sipil sasaran terdampak Disdukcapil, masyarakat

9. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Indikatornya Jumlah ketersediaan informasi administrasi kependudukan. Risiko: keterbatasan atau ketidaktersediaan informasi administrasi kependudukan Risiko eksternal (C), keterbatasan akses pemanfaatan data pada sistem SIAK keterlambatan dalam pengumpulan dan pemutakhiran data kependudukan terdampak Disdukcapil, masyarakat

Wonogiri , Agustus 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL,



HERDIAN. S.IP. M.SI
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP. 19721203 199302 1 001